

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yang diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

#### **B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan ;
  - Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
  - Seksi Keluarga Berencana;
  - Sub Bidang Keluarga Sejahtera
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
  - Seksi Pengendalian Penduduk;
  - Seksi Advokasi dan Informasi
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - Seksi Ketahanan Masyarakat
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan dari struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Lampiran.

### **C. Aspek Strategis**

Untuk menginventarisasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru untuk melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja lembaga ini sebagai Instansi Pemerintah, perlu dilakukan strategi yang meliputi analisis internal dan eksternal yang terdiri dari analisa kekuatan (S) dan kelemahan (W) serta peluang (O) dan hambatan (T) yang dikenal sebagai Analisis (SWOT).

Untuk menganalisis SWOT dapat dikemukakan masalah-masalah sebagai berikut:

#### **1. Kekuatan (Strength)**

Adanya beberapa hal yang menjadi kekuatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yang dapat membantu kelancaran proses pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsinya, Yaitu :

- a. Adanya Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru .
- b. Tersedianya tenaga/ Karyawan yang masih muda dan sebagian berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi jauh kedepan dan berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan kegiatan yang ada.
- c. Adanya dukungan Pemerintah Kota untuk meningkatkan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru dalam membantu kelancaran melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- d. Telah dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), serta Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan (Gerbang Mastaskin), sebagai kelembagaan yang menangani pemberdayaan Masyarakat.
- e. Adanya Organisasi – organisasi Perempuan (TP-PKK, GOW, Dharma Wanita Persatuan, Gatriwara, P2TP2A, Kelompok Desa Prima dan Kelompok UPPKS) yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- f. Adanya PLKB, PPKB, sebagai pelaksana pelayanan KB di Kelurahan dan Kecamatan.
- g. Tersedianya sarana Pelayanan Kantor (Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak), Mobil operasional KB, Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan), Mobil Unit Penerangan (Mupen) dan sarana kendaraan roda untuk PLKB. Serta telah dibangunnya Gudang Alat-alat Kontrasepsi (Alkon) dan Non Kontrasepsi, serta telah dibangunnya 2 (dua) buah Balai Penyuluh Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan Landasan Ulin yaitu di Kelurahan Guntung Manggis dan di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu di Kelurahan Sungai Besar.

- h. Adanya kerja sama yang baik dengan instansi terkait baik dalam Kota Banjarbaru maupun kerja sama Pemerintah Provinsi dan Pusat.

## **2. Kelemahan (Weaknes)**

- a. Belum dibentuknya beberapa kelembagaan masyarakat.
- b. Belum memadainya kelembagaan yang ada dalam mengakomodir berbagai kepentingan Masyarakat setempat, karena keterbatasan ruang gerak kelembagaan tersebut.
- c. Belum optimalnya data dan informasi sebagai pendukung dalam bahan dan analisa proses perencanaan.
- d. Keterbatasan dana operasional.

## **3. Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap masalah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Adanya kelembagaan kemasyarakatan (LPM, TP-PKK, GOW, DWP, Gatriwara, KPM, PLKB, PPKB, Kelompok UPPKS).
- c. Adanya kebijakan dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Adanya data dan informasi guna menunjang permintaan dari instansi lain, swasta dan masyarakat.

- e. Telah dicanangkannya 5 (lima) buah Kampung KB di 5 (lima) kecamatan dalam menunjang program pemerintah pusat untuk perbaikan hidup masyarakat.

#### **4. Ancaman (Threath)**

- a. Tuntutan profesionalisme tenaga kerja yang semakin tinggi
- b. Target keluarga berencana yang masih tinggi
- c. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender
- d. Jumlah PLKB yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada.
- e. Masih kurangnya tenaga kerja yang memadai

### **D. Strategis dan Kebijakan**

#### **1. Visi dan Misi**

- a. Visi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Kota Banjarbaru. Berdasarkan hal tersebut, maka pernyataan visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru adalah ::

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKARAKTER”**

b. Misi

Pernyataan visi tersebut dijabarkan dalam misi dengan rumusan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kota Banjarbaru yang Berdaya Saing dan Sejahtera
2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
3. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan pengendalian penduduk.

**2. Tujuan dan Sasaran**

Dari misi yang ada dijabarkan menjadi tujuan sebagai berikut :

**Misi 1 :** Mewujudkan masyarakat Kota Banjarbaru yang berdaya saing dan sejahtera

**Tujuan :**

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Banjarbaru

**Sasaran :**

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perkembangan Teknologi Tepat Guna

**Misi 2 :** Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

**Tujuan :**

Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kualitas hidup dan perlindungan pada perempuan dan anak

**Sasaran :**

1. Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2. Meningkatkan Pembangunan yang Responsif Gender

**Misi 3 :** Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan Pengendalian Penduduk

**Tujuan :**

1. Meningkatkan fungsi dari BKR, BKL, BKB, PIK-R dan UPPKS di lingkungan masyarakat.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi alat reproduksi manusia.
3. Meningkatkan Penyediaan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang akurat
4. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

**Sasaran :**

1. Meningkatnya Keluarga Sejahtera dan pelayanan KB
2. Meningkatnya penyuluhan / KIE kepada remaja, calon pengantin dan PUS tentang program KB dan kesehatan reproduksi.



3. Meningkatnya pemanfaatan Data Kependudukan dan KB
4. Meningkatnya Kelompok / Mitra kependudukan yang berpartisipasi dalam Pengendalian Penduduk.

### 3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang telah menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Kota Banjarbaru menjadi Kota Pelayanan adalah sebagai berikut :

**Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kota Banjarbaru Berdaya Saing dan Sejahtera</b>			
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan</li> <li>- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perkembangan Teknologi Tepat Guna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan penguatan peran serta Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing</li> <li>- Meningkatkan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendapatkan TTG yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas peran kelembagaan serta partisipasi yang difokuskan pada penguatan kelembagaan masyarakat, dengan dampak kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya</li> <li>- Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi teknologi tepat guna dan mengikutsertakan TTG yang berkualitas terbaik untuk mengikuti lomba TTG ke tingkat yang lebih tinggi</li> </ul>

**Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**

<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kualitas hidup dan perlindungan pada perempuan dan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>- Meningkatnya Pembangunan yang responsive gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pemahaman bagi Pemerintah Aparat Penegak Hukum, Masyarakat &amp; Dunia Usaha tentang pentingnya pencegahan &amp; penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan, terutama bagi SDM yang melayani anak yang berkebutuhan khusus</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi dan pengetahuan kepada semua SKPD, kepada remaja dan masyarakat, tentang peran perempuan dalam program pembangunan, juga meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi dan memperkuat Lembaga Jejaring PUG di daerah, serta perempuan juga mampu untuk duduk sebagai anggota legislative, juga mampu sebagai pejabat perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Sosialisasi tentang pencegahan, penanganan dan pendampingan terhadap kekerasan dalam rumah tangga / kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>- Meningkatkan kualitas Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan yang difokuskan pada penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pada perempuan serta organisasi-organisasi perempuan</li> </ul>
---	---	--	---

**Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan Pengendalian Penduduk**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fungsi dari Meningkatkan fungsi dari BKR, BKL, BKB, PIK-R dan UPPKS di lingkungan masyarakat.</li> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi alat reproduksi manusia.</li> <li>- Meningkatkan Penyediaan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang akurat</li> <li>- Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Keluarga Sejahtere dan pelayanan KB</li> <li>- Meningkatnya Penyuluhan / KIE pada remaja, calon penganten dan PUS tentang program KB dan Kesehatan Reproduksi</li> <li>- Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan KB</li> <li>- Meningkatnya kelompok / mitra kependudukan yang berpartisipasi dalam pengendalian penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta parrtisipasi kepada kader, tenaga penyuluh, BKR, BKB, BKR dan PIK-R tentang KB melalui pelayanan KB gratis untuk peserta KB aktif dan KB baru terutama untuk KB MKJP</li> <li>- Meningkatkan Penyuluhan / Sosialisasi KIE kepada PUS, Remaja serta Calon Penganten</li> <li>- Meningkatkan Kualitas Data Kependudukan dan KB seperti angka kelahiran, meninggal, migrasi agar bermanfaat bagi SKPD yang memerlukan</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi kesemua kelompok/mitra a yang peduli dengan dampak pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kegiatan penyuluhan KIE KB bagi kader, tenaga penyuluh, BKR, BKB, BKL dan PIK-R serta memotivasi melalui lomba-lomba</li> <li>- Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi serta pelayanan KB, sehingga tercipta keluarga yang terprogram dan akan menjadi keluarga sejahtera</li> <li>- Mengumpulkan semua data dan berkoordinasi dengan PLKB, Kader KB, Kelurahan serta dari Instansi terkait guna pembaharuan data yang akurat dan ter-update</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi kesemua kelompok/mitra kependudukan tentang makna pengendalian penduduk sehingga terjadi keadaan penduduk yang tumbuh seimbang</li> </ul>
--	---	---	--

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yang selanjutnya tertuang dalam Perjanjian Kinerja, merupakan rencana kinerja bagi Kepala SKPD untuk diperjanjikan dengan Kepala Daerah yakni Walikota Banjarbaru sebagai penilaian kinerja bagi SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target-target yg ingin dicapai. Sasaran strategis seperti yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru periode 2016-2021, beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Indikator :

- Prosentase Swadaya masyarakat terhadap program-program pemberdayaan Masyarakat

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Perkembangan TTG

- Prestasi Inovasi TTG yang diikuti sertrakan pada lomba TTG Nasional

3. Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikatornya:

- Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

4. Meningkatnya pembangunan yang Responsif Gender

Indikatornya:

- Prosentase SKPD yang PPRG

5. Meningkatnya Keluarga Sejahtera dan Pelayanan KB

Indikatornya:

- Prosentase Keluarga Sejahtera

6. Meningkatnya penyuluhan / KIE pada remaja, calon penganten dan PUS tentang program KB dan Kesehatan reproduksi

Indikatornya :

- Persentase pemakaian kontrasepsi bagi PUS

7. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan dan KB

Indikatornya :

- Jumlah Instansi / SKPD yang memanfaatkan Data Kependudukan dan KB

8. Meningkatnya kelompok / mitra kependudukan yang berpartisipasi dalam pengendalian penduduk

Indikatornya:

- Prosentase partisipasi kelompok / mitra kependudukan

**Tabel. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru Tahun 2019**

<b>NO..</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Indeks Kepuasan Internal	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
2.	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan	100 %
3.	Nilai Evaluasi AKIP	Terpenuhinya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	B
4.	Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Instansi / SKPD yang memanfaatkan Data Kependudukan dan KB	9 SKPD
5.	Meningkatnya kelompok / mitra kependudukan yang berpartisipasi dalam pengendalian penduduk	prosentase partisipasi kelompok / mitra kependudukan	100%
6.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera dan Pelayanan KB	Persentase Keluarga Sejahtera	100%
7.	Meningkatnya penyuluhan/KIE pada remaja, calon penganten dan PUS tentang program KB dan kesehatan reproduksi	Persentase pemakaian kontrasepsi bagi PUS	12 %
9.	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat	100%
10.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam TTG	Prestasi Inovasi TTG yang diikuti sertakan pada Lomba TTG Nasional	5 besar
11.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
12	Meningkatnya Pembangunan yang Responsif Gender	Presentasi SKPD yang PPRG	45 %

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
  - a. Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS
  - b. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
  - c. Kampung KB
  - d. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi KB
2. Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB
  - a. Pembangunan Alih / Fungsi Balai Penyuluh (DAK)
3. Program Peningkatan Dukungan Operasional KKBPK Lini Lapangan
  - a. Operasional bagi balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)
4. Program Pengendalian Kependudukan
  - a. Pembinaan Forum Kerjasama Pengendaliah Kependudukan
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
  - a. Kota Layak Anak
  - b. Pembinaan P2W-KSS, Kader PKK dan Posyandu
  - c. Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri
  - d. Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - a. Pembinaan Organisasi Perempuan
  - b. Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - c. Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
  - d. Pembinaan Organisasi DWP

- e. Pembinaan Organisasi Gatriwara
- 7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
  - a. Peningkatan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - b. Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu
  - c. Gelar Teknologi Tepat Guna
- 8. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
  - a. Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
  - b. Lomba Kelurahan
  - c. Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan
  - d. Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan
- 9. Program Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan KB
  - a. Penyusunan Laporan Kependudukan dan KB
  - b. Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan KB



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah agar pertanggungjawaban tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran visi, misi, sasaran dan arah kebijakan yang diindikasikan dengan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan yang akan dicapai. Kedelapan sasaran tersebut selanjutnya akan diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja dapat dijelaskan dengan table berikut :

NO..	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Instansi / SKPD yang Pemanfaatan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	9 SKPD	9 SKPD
2.	Persentase partisipasi kelompok / mitra kependudukan Kependudukan	100%	100%
3.	Persentase Keluarga Sejahtera	100%	100%
4.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi bagi PUS	12 %	12 %
5.	Persentase swadaya masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat	100%	100%
6.	Prestasi Inovasi TTG yang diikuti sertakan pada lomba TTG nasional	5 besar	3 besar
7.	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	98 %
8.	Persentase PPRG yang PPRG	45 %	65 %

## **SASARAN 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Sasaran ini dipilih dengan maksud untuk dapat mengetahui seberapa besar, seberapa banyak data Kependudukan dan KB yang dihimpun dapat bermanfaat bagi SKPD dan Instansi-Instansi terkait dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan program KKBPK.

Adapun realisasi pada tahun 2018 dari hasil pendataan yang telah dilakukan dan tercatat SKPD dan Instansi lain yang meminta dan mengharapkan penyampaian laporan ada sebanyak 9 SKPD/Instansi terkait, yaitu :

- Kementrian BKKBN sebagai laporan pelaksanaan pendataan di Kota Banjarbaru dalam tahun berjalan.
- BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan sebagai laporan pelaksanaan pendataan di Kota Banjarbaru s/d tahun berjalan
- BPS Kota Banjarbaru sebagai bahan Data pembuatan buku laporan Data BPS
- Bagian Ekonomi sebagai bahan untuk pembuatan buku laporan Banjarbaru dalam angka
- Kantor Kementrian Agama Kota Banjarbaru
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Kesehatan
- Kecamatan

Hal tersebut diatas sesuai dengan kinerja yang ditargetkan bahwa dari pekerjaan pendataan yang dilakukan oleh seksi Advokasi dan Informasi pada Bidang Pengendalian Penduduk rekapitulasi dari data yang dihasilkan akan diperlukan oleh 9 Instansi / SKPD.

Untuk kedepannya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru akan berusaha untuk memperbaharui keadaan data yang telah ada dan menambah jumlah-jumlah data yang akan dihimpun berkaitan dengan permasalahan kependudukan untuk penanggulangan pengendalian penduduk di Kota Banjarbaru, sehingga akan bertambah Instansi / SKPD yang memerlukan data dimaksud.

**SASARAN ke 2 : Meningkatnya Kelompok / Mitra Kependudukan yang berpartisipasi dalam Pengendalian Penduduk**

Sasaran ini dipilih dengan maksud untuk mengetahui partisipasi kelompok/ mitra kependudukan terhadap program pengendalian penduduk,

**SASARAN ke 3 : Meningkatnya Keluarga Sejahtera dan Pelayanan KB**

Dipilihnya sasaran ini dengan maksud meningkatkan pembinaan pada kelompok-kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Kelompok UPPKS yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompoknya agar penghidupan mereka lebih sejahtera.

Adapun indikator sasaran ini adalah Persentase Keluarga Sejahtera yang didapat dengan perhitungan jumlah keluarga sejahtera dibagi dengan jumlah Keluarga di kali 100 %. Adapun jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota kelompok UPPKS didapat berdasarkan hasil pendataan keluarga Bidang Keluarga Berencana setiap tahunnya.

**Tabel Capaian Meningkatnya Pembinaan Pada Kelompok-kelompok Kegiatan Seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS**

Indikator Kinerja	Realisasi		2018		Capaian
	2016	2017	Target	Realisasi	
Rasio Keluarga Pra Sejahtera	3,98%	1,25%	4%	1,62%	
Jumlah PUS peserta KB anggota UPPKS	762 orang	719 orang	736 orang	813 orang	

Berdasarkan tabel diatas pada indikator Rasio Keluarga Pra Sejahtera, realisasi tahun 2018 lebih rendah dibandingkan target yang ada. Hasil tersebut didapat dari perhitungan jumlah keluarga pra sejahtera sebesar 563 KK dibagi dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebesar 55.965 dikali 100 persen hingga didapat rasio sebesar 1,62 persen.

Realisasi pada tahun 2017 sebesar 1,25 persen, maka realisasi tahun 2018 masih lebih tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar

3,98 persen, maka realisasi tahun 2018 justru lebih rendah. Hal ini tidak terlepas dari faktor peningkatan jumlah Kepala Keluarga (KK) setiap tahunnya dan penurunan jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS), seperti yang terlihat pada tabel berikut.

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah KK	54.081	55.390	55.965
Jumlah KPS	2.154	692	563

Peningkatan jumlah KK dapat diartikan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang telah berkeluarga seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru. Sedangkan penurunan jumlah KPS berarti bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Banjarbaru semakin membaik.

Pada indikator jumlah PUS peserta KB anggota UPPKS terlihat bahwa realisasi tahun 2018 lebih tinggi dibanding target yang ditentukan, bahkan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2016 dan 2017. Peningkatan ini dapat diartikan bahwa berbagai pembinaan terhadap PUS anggota UPPKS cukup berhasil. Hasil Pendataan Pengendalian Lapangan (DALAP) dengan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga memperlihatkan bahwa jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS sebesar 1.107 orang, sedangkan anggota kelompok UPPKS berstatus PUS ber-KB sebesar 815 orang.

Selain pembinaan terhadap kelompok-kelompok UPPKS, masih ada lagi pembinaan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan tujuan yang sama yaitu membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompoknya agar penghidupan mereka lebih sejahtera.

Sasaran ini dipilih dengan maksud untuk mengetahui peran aktif masyarakat di kelurahan dalam membantu pelaksanaan pembangunan secara bersama-sama dan bergotong royong untuk kemajuan Kota Banjarbaru. Sebagai tolok ukur capaian ditentukanlah swadaya masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat sebagai indikator sasarannya.

Penilaian terhadap indikator kinerja persentase swadaya masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat menggunakan perhitungan jumlah program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dibagi dengan jumlah program pemberdayaan masyarakat yang diterima oleh masyarakat dikali 100 persen.

**Tabel Capaian Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan**

Indikator Kinerja	Realisasi		2018		Capaian
	2016	2017	Target	Realisasi	
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	

--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja persentase swadaya masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat tahun 2018 terhadap target tercapai 100 persen.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang diterima oleh masyarakat berupa kegiatan posyandu, gerakan nasional bulan bhakti gotong royong masyarakat, pembinaan dalam rangka lomba kelurahan dan teknologi tepat guna.

Kegiatan pemberian dana operasional untuk posyandu pada 195 kelompok posyandu telah terlaksana seluruhnya. Diberikan secara bertahap per kecamatan dan diharapkan mampu membantu pelaksanaan posyandu secara operasional. Biaya operasional tersebut diserahkan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per posyandu per tahun. Dari 195 kelompok posyandu yang ada terdiri dari 154 kelompok posyandu balita dan 41 kelompok posyandu Lansia.

Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat setiap tahun. Pada Tahun 2018 di Kota Banjarbaru Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini dicanangkan di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka dan dilaksanakan selama sebulan penuh disemua kelurahan. Gerak nyatanya biasanya diatur dan digerakkan oleh masyarakat, diumumkan di kelurahan-kelurahan melalui RT-RT, serta diumumkan juga di mesjid-mesjid atau mushola masing-masing wilayah, sehingga masyarakat benar-benar bergerak secara



bergotong royong membersihkan lingkungannya. Harapannya budaya gotong royong ini terus melekat di masyarakat dan tidak hanya pada bulan itu saja.

Dalam rangka menghadapi Lomba Kelurahan, maka dilakukan pembinaan-pembinaan dengan membentuk tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, berkelanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing antar kelurahan.

Dengan pembinaan tersebut diharapkan kemandirian masyarakat di kelurahan dapat berkembang sehingga pembangunan di kelurahan bisa lebih maju dan kesejahteraan masyarakat lebih merata.

Pemerintah Kota Banjarbaru mengadakan Lomba Kelurahan untuk tingkat Kota Banjarbaru melalui kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru. Dilaksanakan lomba tingkat kota dan didapatkan Kelurahan Guntung Paikat sebagai pemenangnya. Kelurahan tersebut berhak untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapatkan predikat Juara I tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya Kelurahan Guntung Paikat berhak ikut serta pada puncak peringatan Lomba Kelurahan Tingkat Nasional di Propinsi Bali pada bulan Oktober 2018.

Kegiatan Teknologi Tepat Guna, juga diharapkan mampu membangun swadaya masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarganya dengan menciptakan inovasi-inovasi baru berbasis teknologi sederhana. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggelar lomba Teknologi Tepat Guna di Aula Lingkungan Intan.

Selain kegiatan-kegiatan diatas masih ada kegiatan lain yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat seperti kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang tepat waktu dan tepat sasaran.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Pengetahuan / Pemahaman Masyarakat tentang Kualitas Hidup dan Perlindungan Pada Perempuan dan Anak**

Sasaran ini dipilih dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sebagai tolok ukur capaian ini dipilih Persentasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan dan menjadi indikator sasarnya.

Penilaian penyelesaian tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan rumus perhitungan jumlah kasus kekerasan yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk dalam Unit Pelayanan Terpadu dikali 100 persen.

**Tabel Capaian Meningkatnya Pengetahuan/ Pemahaman Masyarakat Tentang Kualitas Hidup dan Perlindungan Pada Perempuan Dan Anak**

Indikator Kinerja	Realisasi	2018	Capaian
-------------------	-----------	------	---------

	2016	2017	Target	Realisasi	
Rasio KDRT	0,039%	0,024%	100%	98%	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi nilainya masih rendah dan tidak sesuai dengan yang ditargetkan, Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk pada Unit Pelayanan Terpadu yang terdapat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tahun 2018 sebanyak 16 kasus dibagi jumlah **rumah tangga se kota Banjarbaru yang angkanya didapat dari buku Banjarbaru Dalam Angka pada tahun 2018 berjumlah 69.965 rumah tangga dikali 100 persen. Sehingga didapat angka sebesar 0,023 persen.**

Dibandingkan dengan tahun 2017, rasio KDRT sebesar 0,017 persen, karena jumlah pengaduan yang masuk hanya 11 kasus dibagi dengan jumlah rumah tangga sebesar 64.705 rumah tangga.

Jika dibandingkan lagi dengan rasio KDRT tahun 2017, maka jumlah pengaduan yang masuk ke P2TP2A lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada jumlah pengaduan yang masuk ke Unit Pelayanan Terpadu. Hal ini terjadi karena jumlah sosialisasi ke masyarakat pada tahun 2018 memang lebih banyak sehingga masyarakat yang berani melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak.

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah Pengaduan yg masuk	11	25	16
Jumlah Rumah Tangga	64.705	66.744	69.965

*Sumber Data : Banjarbaru Dalam Angka Tahun 2017*

Menurut catatan yang terdapat pada P2TP2A tahun 2018 dari 16 kasus yang masuk, semuanya telah ditangani dengan baik, baik melalui jalur kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, maupun penanganan secara psikologi (data terlampir).

Berdasarkan data-data di atas diperkirakan masih banyak lagi kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat terhadap perempuan dan anak, tetapi masih belum melaporkan. Hal ini terkait dengan budaya masyarakat kita yang menganggap permasalahan rumah tangga adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dengan orang lain.

Maka disinilah peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru sebagai leading sektor kegiatan P2TP2A yang memuat lintas sektor berbagai SKPD / instansi terkait dengan permasalahan KDRT ini.

Langkah yang akan diambil selanjutnya adalah :

1. Masih harus melakukan sosialisasi / penyuluhan pada masyarakat
2. Memperbanyak petugas pada secretariat P2TP2A dalam melayani banyaknya pengaduan yang masuk.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Pengetahuan / Pemahaman Tentang Pengarusutamaan Gender**

Sasaran ini dipilih dengan maksud agar masyarakat lebih memahami istilah pengarusutamaan gender untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan di masyarakat. Indikator kinerja sasaran ini adalah rasio partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah.

Adapun cara perhitungan indikator ini adalah jumlah perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah Kota Banjarbaru dibagi dengan jumlah semua penentu kebijakan publik yang ada pada Pemerintah Kota Banjarbaru dikali 100 persen.

**Tabel Capaian Meningkatnya Pengetahuan / Pemahaman Tentang Pengarusutamaan Gender**

Indikator Kinerja	Realisasi		2018		Capaian
	2016	2017	Target	Realisasi	
Rasio Partisipasi Perempuan Penentu Kebijakan Publik di Lembaga Pemerintah	18%	18%	21%	22,86%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 belum ada perubahan jumlah perempuan penentu kebijakan publik di lembaga Pemerintah Kota Banjarbaru. Pada tahun 2017 tercatat ada sebanyak 8

(delapan) orang perempuan yang menjadi penentu kebijakan publik pada Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala SKPD dari total Kepala SKPD penentu kebijakan publik di Pemerintah Kota Banjarbaru yang berjumlah 45 kepala SKPD.

Pada tahun 2018 ini penghitungan terhadap partisipasi perempuan yang menjadi penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah diperluas dan ditambah dengan jumlah penentu kebijakan di lembaga legislatif.

Jumlah Penentu Kebijakan Publik di Lembaga Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun 2018

<b>Uraian</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Penentu Kebijakan Publik di Lembaga Legislatif	17	8	25
Penentu Kebijakan Publik di Lembaga Eksekutif	37	8	45
Jumlah	54	16	70

*Sumber data : BKPP Kota Banjarbaru tahun 2017*

Alasan Dilihat dari uraian dan tabel di atas maka hasil perhitungan rumus yang ada menghasilkan persentasi sebesar 22,86 persen dengan capaian sebesar 108,86 persen dipilihnya yang menunjukkan adanya peningkatan pada perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintahan Kota Banjarbaru.

**Sasaran 4 : Meningkatkan Penyuluhan / KIE Pada Remaja, Calon Penganten dan PUS tentang Program KB dan Kesehatan Reproduksi**

Alasan dipilihnya sasaran ini dengan maksud agar para remaja, calon penganten dan pasangan usia subur (PUS) lebih mengerti tentang program Keluarga Berencana serta bagaimana menjaga kesehatan reproduksi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk. Indikator sasaran ini ada 2 (dua) yaitu rasio cakupan peserta KB baru dan cakupan peserta KB aktif.

Cara perhitungan indikator rasio cakupan peserta KB baru adalah jumlah peserta KB baru dibagi dengan Pasangan Usia Subur (PUS) dikali 100 persen.

Cara perhitungan indikator cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur (PUS) dikali 100 persen.

**Tabel Capaian Meningkatnya Penyuluhan / KIE pada Remaja, Calon Penganten dan PUS tentang Program KB dan Kesehatan Reproduksi**

Indikator Kinerja	Realisasi		2018		Capaian
	2016	2017	Target	Realisasi	
Rasio Cakupan Peserta KB Baru	14,88%	16%	12%	12,88%	
Cakupan Peserta KB Aktif	75%	74,31%	67%	71,20%	

Berdasarkan tabel di atas Rasio Cakupan Peserta KB Baru meningkat dibandingkan target yang ada. Jumlah peserta KB baru yang sebesar 4.982 orang dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak

38.671 orang dikali 100 persen, sehingga rasio cakupan peserta kb baru sebesar 12,88 persen pada tahun 2018 ini.

Data jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), jumlah KB Aktif dan KB Baru dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat dilihat dibawah ini.

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah PUS	41.770	38.815	38.671
Jumlah KB Aktif	31.346	28.845	27.531
Jumlah KB Baru	6.217	6.287	4.982

*Sumber Data : Hasil Pendataan Pengendalian Lapangan (DALAP)*

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dan tahun 2017, maka realisasi tahun 2018 lebih rendah, karena jumlah peserta KB baru menurun cukup signifikan. Faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut antara lain adalah masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang hamil, Ingin Anak Segera (IAS) dan Ingin Anak Ditunda (IAT).

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan agar dapat meningkatkan jumlah peserta KB baru, seperti penyuluhan-penyuluhan KB, sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE) baik pada kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), kelompok UPPKS, bagi calon penganten maupun kelompok Generasi Berencana



(GENRE) oleh Penyuluh Lapangan KB dan Kader-kader KB seperti PPKBD dan Sub PPKBD.

Pada Cakupan Peserta KB Aktif peningkatan realisasi tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan target yang diinginkan. Jumlah peserta KB aktif sebesar 27.531 akseptor dibagi dengan jumlah PUS sebesar 38.671 akseptor dikali 100 persen hingga didapat angka sebesar 71,20 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa dari 38.671 akseptor pasangan usia subur 71,20 persennya adalah menjadi peserta KB aktif, sedangkan sisanya adalah pasangan usia subur yang bukan peserta KB atau yang disebut Unmet Need (ingin ber-KB, tetapi tidak terpenuhi). Kondisi ini biasanya terjadi karena beberapa faktor yaitu karena dalam keadaan hamil, ingin segera punya anak, ingin punya anak ditunda dan tidak ingin punya anak lagi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan 2018, maka realisasi tahun 2018 lebih rendah, hal ini karena jumlah peserta KB dan jumlah PUS yang menurun. Faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah banyaknya PUS yang telah berusia di atas 45 tahun, sehingga dikategorikan tidak aktif lagi.

#### **Sasaran 4 : Meningkatnya Pembinaan pada Kelompok-Kelompok Kegiatan seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS**

Dipilihnya sasaran ini dengan maksud meningkatkan pembinaan pada kelompok-kelompok BKB, BKR, BKL dan kelompok UPPKS yang bertujuan meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompoknya agar penghidupan mereka lebih sejahtera terutama bagi keluarga pra sejahtera.

## B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang diterima Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru tahun 2018 sebesar Rp. 8.553.979.560,- digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Pagu tersebut terbagi menjadi 2 yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai berupa Gaji Pegawai Negeri Sipil beserta Tambahan Penghasilan, semuanya berjumlah Rp. 3.424.460.160,-

Belanja Langsung terdiri dari belanja yang berasal dari dana APBD Kota Banjarbaru sebesar Rp. 5.129.519.400,- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 426.098.000,- dan DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Untuk Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BOKB) sebesar Rp. 821.390.000,-

Realisasi pagu anggaran diatas dapat dilihat pada table berikut :

No.	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.424.460.160,-	3.043.590.095,-
2.	Belanja Langsung	5.129.519.400,-	4.632.728.917,-
	- APBD	3.882.031.400,-	3.694.828.917,-
	- DAK Fisik	426.098.000,-	423.005.000,-
	- DAK Non Fisik (BOKB)	821.390.000,-	514.895.000,-
	J U M L A H	8.553.979.560,-	7.676.319.012,-

Total realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru sebesar Rp. 7.676.319.012,- atau sebesar 89,74 persen.

Realisasi serapan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian target-target dari sasaran strategis dan terbagi ke dalam 3 (tiga) bidang urusan, yaitu:

1. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat
2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan
3. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

#### **BAB IV**

## PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru tahun 2018 ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja yang dicapai pada periode tahun anggaran 2018 secara menyeluruh, dalam upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pengetahuan/pemahaman tentang pengarusutamaan gender, meningkatkan penyuluhan/KIE pada remaja, calon penganten dan PUS tentang program KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatkan pembinaan pada kelompok-kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS seperti yang tercantum dalam sasaran strategis dan termuat dalam Perjanjian Kinerja.

Berbagai keberhasilan dan kekurangan dapat dilihat dari tabel-tabel yang telah disajikan dalam laporan ini berupa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru melaksanakan Rencana Strategis(Renstra) periode 2016-2021. Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai bahkan sebagian ada yang melampaui target yang ada.

Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian indikator outcome yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Banjarbaru akan berupaya meningkatkan fungsi koordinasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada, agar bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari instansi-instansi terkait.

Kedepannya dengan bekal komitmen, kesamaan persepsi dan sumber daya yang ada, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru akan terus meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga amanah RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021 dapat dicapai dan ditingkatkan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Masyarakat, Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Kota Banjarbaru

**Ir. Hj. PUSPA KENCANA, MP**  
**NIP. 19640427 199103 2 009**